

Politik Luar Negeri AS dan Australia Dalam Isu Terorisme dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia

Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.

Kepentingan AS di Indonesia

- Memerangi dan mencegah terorisme pada tingkat domestik, regional maupun global untuk melindungi kepentingan *national security* AS.
- Menjalinkan kerjasama dengan sekutu dan negara sahabat atau mitra termasuk Indonesia dalam kerangka rezim keamanan internasional di bawah PBB.
- AS selalu menyatakan *disclaimer* bahwa yang dimusuhi atau diperangi adalah terorisme bukan agama yang dijadikan sebagai justifikasi untuk tindak kekerasan.
-

- Disclaimer ini membawa *profound implications* dalam perumusan kebijakan *global war on terror* maupun pelaksanaannya. Serangan militer yang dilakukan oleh AS dan sekutunya (Israel) yang menimbulkan korban rakyat sipil menciptakan distrust and bitterness sehingga upaya via public diplomacy gagal.
- Hal ini terlihat dalam *double strategy* AS yaitu kombinasi penggunaan *coercive or military force* dan *diplomatic outreach* ke negara-negara terkait dengan menekankan peran diplomasi publik dan *people to people interactions*. Contoh: pidato Obama di Kairo dan UI serta pengangkatan utusan khusus ke *Muslim world* di bawah Menlu Hilary Clinton.

Kepentingan Australia di Indonesia

- Dengan kedekatan geografis serta pasar yang potensial, Indonesia menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Australia.
- Mantan Dubes Richard Woolcott: “In the longer term, no bilateral relationship [in the region] is more important to Australia than that with Indonesia”.
- Beberapa kutipan penting dari *Australia’s 2013 Defense White Paper*”:
 - *As Indonesia comprises much of this archipelago, Australia’s strong partnership with Indonesia remains our most important regional strategic relationship and the partnership continues to deepen and broaden in support of our significant shared interests”.*

- *“Although the reach and potency of Southeast Asian terrorism has been constrained by the success of regional counterterrorism efforts, especially in Indonesia, it remains the case that it is in Southeast Asia that Australians are more likely to be targeted”.*
- Indonesia menjadi gerbang bagi Australia untuk membangun akses ke mitra dagang utamanya di Asia seperti China, Jepang, India, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Singapore.

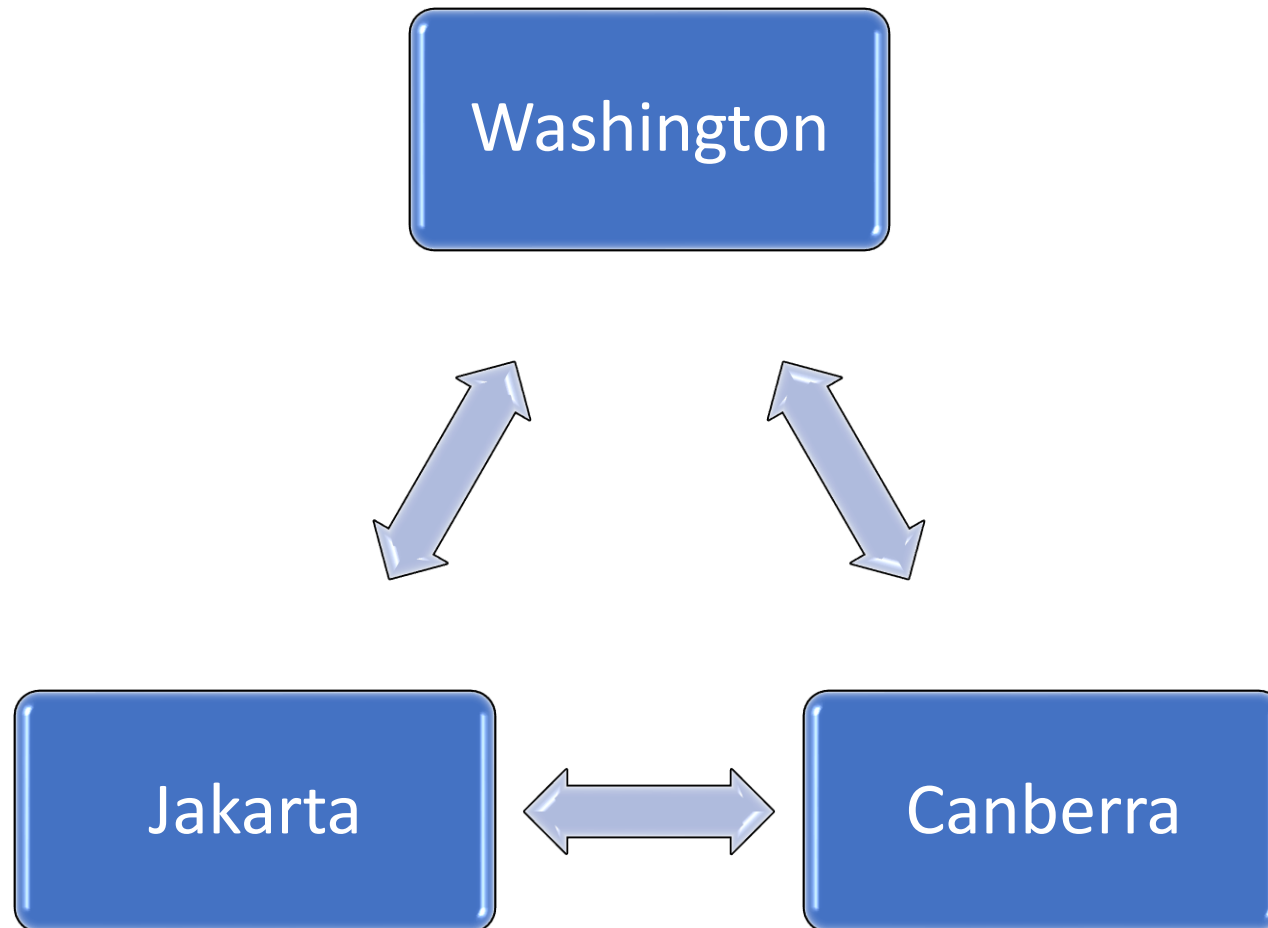
The Unwanted Contradictory Implications Of US Double Strategy In Combatting Terrorism



Keterlibatan Langsung Atau Tidak Langsung Militer AS Di Berbagai Negara Dalam Memerangi Terorisme

Negara atau wilayah	Bentuk keterlibatan atau engagement
Yemen	Persenjataan, penasihat militer, latihan militer, pertukaran data intelijen
Arab Saudi	Persenjataan, penasihat militer, latihan militer dan pertukaran data intelijen
Irak	Persenjataan, penasihat militer, latihan militer dan pertukaran data intelijen
Somalia	Persenjataan, penasihat militer, latihan militer dan pertukaran data intelijen
Afghanistan	Persenjataan, penasihat militer, latihan militer dan pertukaran data intelijen
Pakistan	Persenjataan, penasihat militer, latihan militer, personil dan pertukaran intelijen
Asia Tenggara (Indonesia, Thailand dan Philipina)	Persenjataan, latihan militer dan pertukaran data intelijen

Karakteristik Utama Hubungan Triangle: Washington, Canberra dan Jakarta Menyikapi Isu Terorisme Global



Karakteristik Utama Hubungan Segitiga AS, Australia Dan Indonesia:

- Pada level pemerintahan terjalin hubungan yang didasari mutual understanding dan menganggap posisi satu sama lain penting dan bahkan strategis.
- Baik AS maupun Australia melihat Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN serta faktor kunci keamanan kawasan Asia Tenggara.
- Karena itu stabilitas dan keamanan Indonesia juga menjadi concern dan perhatian kedua negara tersebut.
- Indonesia yang kuat, stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menguntungkan strategi kedua negara di Asia Tenggara. Apalagi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan ini bisa dijadikan sebagai mitra mengimbangi rezim komunis China.

- Tetapi dalam berbagai isu internasional pandangan pemerintah Indonesia belum tentu selalu sama dengan AS dan Australia. Misalnya: isu konflik Israel - Palestina, status HAMAS, serangan dengan pesawat tanpa awak di Pakistan dan Afghanistan yang menewaskan rakyat sipil.
- Selain itu sebagai negara demokrasi pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi sikap kritis atau *cynical* konstituen politik dalam negeri terhadap AS dan Australia.
- Jadi perlu dibedakan hubungan G to G yang pada dasarnya berjalan baik selama pemerintahan SBY di satu pihak dan hubungan P to P yang sangat dipengaruhi oleh transnasionalisme isu terorisme dan konflik bernuansa keagamaan lainnya.

Indonesia Di Mata Washington Dan Canberra

- Terorisme masih menjadi ancaman yang nyata di Indonesia terhadap kepentingan AS dan Australia. Penyebaran ideologi terorisme dan rekrutmen pelaku terus berlangsung meskipun kapasitas untuk “major strike” seperti Bom Bali sudah berkurang.
- Indonesia dilihat sebagai mitra penting dalam memerangi terorisme di Asia Tenggara.
- Selain konsistensi pemerintah Indonesia dalam menggunakan *repressive measures* (Densus 88) maupun *law enforcement measures* (penangkapan dan pengadilan) sangat diapresiasi oleh AS dan Australia.

- Indonesia dilihat sebagai proyek ideal yang mewujudkan double strategy AS jangka panjang melawan ideologi terorisme yaitu kombinasi konsolidasi demokrasi dengan law enforcement (plus the use of coercive force, if needed).
- Merosotnya mutu demokrasi lantaran kudeta militer di Mesir menjadikan Indonesia “primadona” demokrasi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.
- Baik AS maupun Australia menghargai peran penting Indonesia sebagai salah satu founder dari Global Counterterrorism Forum (GCTF) sebagai lembaga informal untuk multilateral counterterrorism.

- Bahkan pada tahun 2012 Indonesia dan Australia menjadi co-chair dalam Inaugural meeting of the Southeast Asia Working Group of GCTF di Semarang.
- AS dan Australia secara aktif membantu *capacity building* dan training dari Densus 88.

Catatan Penting Untuk Kebijakan Luar Negeri RI Dalam Isu Terorisme

- Penanggulangan terorisme bagi Indonesia bukan hanya masalah keamanan tetapi juga identity sebagai moderate force dalam politik internasional.
- Kebijakan *counterterrorism* Indonesia harus tetap independen dan tidak memberi kesan bahwa pemerintah hanya menjadi instrumen asing atau menjalankan agenda asing di Indonesia.
- Legitimasi kebijakan *counterterrorism* dan kebijakan dalam hubungan bilateral dengan AS maupun Australia perlu melibatkan *civil society groups* terutama yang berkaitan dengan upaya deradikalisasi oleh BNPT.

- *Travel warning* yang sering dikeluarkan oleh AS dan Australia karena alasan keamanan di Indonesia merupakan *negative campaign* untuk citra Indonesia di mata asing dan menjadi tanda adanya unsur *distrust* dalam hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut.
- Indonesia perlu mencermati apakah pemerintahan dari kelompok konservatif di bawah PM Tony Abott bisa menjaga keseimbangan antara Australia sebagai sekutu AS di Asia dan sensitivitas hubungan Australia - Indonesia.

References:

- Corciari, John D. (2010). “Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia”. Paper for the International Conference on *Issues & Trends in Southeast Asia*, Center for Southeast Asian Studies, University of Michigan - October 22, 2010.
- Grugel, Jean (2004). “State Power and Transnational Activism” in Nicola Piper and Anders Uhlin (eds.). *Transnational Ativism in Asia*. London: Routledge.
- Human Rights Watch report (<https://www.voanews.com/a/human-rights-watch-southeast-asia/3674978.html> titled “Deteriorating Outlook for Human Rights in SE Asia”)
- Jemadu, Aleksius (2004). “Transnational Activism and the Pursuit of Democratization in Indonesia: National, Regional and Global Networks” in Nicola Piper and Anders Uhlin (eds.). *Transnational Ativism in Asia*. London: Routledge.